

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Gaji direksi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sangat tinggi menjadi sorotan masyarakat Indonesia (Himawan, 2017). Majalah Forbes tahun 2018 mengeluarkan daftar yang disebut Global 2000. Daftar tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 6 perusahaan Indonesia masuk ke dalam 500 perusahaan terbaik dunia kategori pemberi kerja terbaik (Sutianto, 2018). Daftar gaji direksi 6 perusahaan terbaik asal Indonesia tersebut antara lain: 1) Bank Mandiri (Peringkat 11) sebesar Rp 1,6 miliar per bulan; 2) BCA (Peringkat 32) sebesar Rp 2,68 miliar per bulan; 3) Gudang Garam (Peringkat 109) sebesar Rp 894 juta per bulan; 4) Telkom Indonesia (Peringkat 112) sebesar Rp 1,88 miliar per bulan; 5) Bank Negara Indonesia/ BNI (Peringkat 157) sebesar Rp 1,5 miliar per bulan; dan 6) Bank Rakyat Indonesia/ BRI (Peringkat 186) sebesar Rp 1,5 miliar per bulan.

Kompensasi eksekutif menarik perhatian akademisi, praktisioner, maupun pembuat kebijakan karena karakternya yang unik sebagai salah satu mekanisme tata kelola sekaligus biaya bagi perusahaan (Chizema, Liu, Lu, dan Gao, 2014). Mathis dan Jackson (2008) menyebutkan bahwa kompensasi terbagi menjadi 2 yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Peraturan tentang kompensasi eksekutif perusahaan di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal

113 menyatakan bahwa gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewan komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Indonesia, 2007).

Penelitian-penelitian terkait kompensasi eksekutif yang telah dilakukan antara lain; kompensasi eksekutif dan manajemen laba (Park, 2018), kompensasi eksekutif dan kinerja perusahaan (Alves, Couto, dan Francisco, 2016; Raithatha dan Komera, 2016), kompensasi eksekutif dan risiko perusahaan (Abrokwah, Hanig, dan Schaffer, 2018) dan pengaruh direktur independen, direktur non-pengendali, dan sensitivitas pembayaran-untuk-kinerja eksekutif (Zhou, Wang, Zhang, dan An, 2018), koneksi politik legislatif dan kompensasi CEO (Fralich dan Fan, 2018), pengaruh koneksi politik dengan kompensasi eksekutif (Chizema dkk., 2014; H. Wu, Li, Ying, dan Chen, 2018),

Di Indonesia, penelitian-penelitian tentang kompensasi eksekutif banyak di arahkan ke penghindaran pajak (Dewi dan Sari., 2015; Hanafi dan Harto, 2014) serta kinerja perusahaan (Sari dan Harto, 2014; Vidyatmoko, Sanim, Siregar, dan Didu, 2009). Studi yang meneliti tentang pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif di Indonesia belum banyak tereksplorasi.

*Research gap* dalam penelitian ini adalah adanya hasil penelitian sebelumnya yang berlawanan terkait pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif. Chizema dkk. (2014) mengungkapkan bahwa dewan yang memiliki koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kompensasi eksekutif puncak. Chizema dkk. (2014) menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik di Cina memberikan tingkat kompensasi eksekutif yang lebih rendah. H. Wu dkk. (2018) sebaliknya mengungkapkan bahwa koneksi politik

yang dimiliki manajemen puncak berpengaruh positif dengan kompensasi yang diperolehnya. Koneksi politik merupakan faktor penting dalam penentuan kompensasi eksekutif di perusahaan swasta Cina. Fralich dan Fan (2018) menyajikan bukti bahwa dewan dalam perusahaan yang juga anggota politik *National People Congress (NPC)* memberikan nilai strategis yang dihargai dengan gaji yang lebih tinggi. Koneksi politik yang dimiliki oleh manajemen puncak merupakan strategi penting bagi perusahaan dalam mendapatkan legitimasi politik dan akses ke sumber daya yang dikendalikan pemerintah dan karenanya harus menjadi faktor penting dalam menentukan gaji atau kompensasi eksekutif.

Riset terkait koneksi politik di Indonesia selalu menarik untuk dilakukan karena Indonesia merupakan negara dengan pasar berkembang dengan sejarah koneksi politik yang kuat dalam bisnis (Harymawan dan Nowland, 2016). Pengusaha yang terjun ke dalam dunia politik di Indonesia semakin banyak (Raharjo, 2016). Beberapa fenomena pencalonan pengusaha-pengusaha yang masuk dunia politik, seperti Wiranto dan Hary Tanoesoedibyo sebagai calon presiden dan wakil presiden Indonesia yang diajukan oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada tahun 2013 (Deil, 2013). Pengusaha Sandiaga Uno yang menjadi bagian dari tim sukses Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2014 dan bergabung dengan Partai Gerindra pada 8 April 2015 serta mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2019. Di Indonesia, kebijakan yang mendefinisikan secara rinci tentang pihak-pihak yang dikategorikan memiliki hubungan politik telah diatur oleh Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam peraturan tentang *Politically Exposed Person* (PEP).

Para direksi sebagai manajemen perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham atau pemilik. Subramanyam (1996) dan Siregar dan Utama (2008) menunjukkan bahwa manajemen laba dapat bertindak sebagai metode untuk menyampaikan informasi akuntansi dan dengan demikian meningkatkan kemampuan laba untuk mencerminkan nilai fundamental, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan bagi investor. Burgstahler dan Dichev (1997) serta Balsam, Bartov, dan Marquardt (2002) mendeskripsikan manajemen laba sebagai manipulasi keuangan berbahaya yang dapat mendistorsi laba yang dilaporkan.

Pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba telah dikaji oleh beberapa peneliti. Chaney, Faccio, dan Parsley (2011) membuktikan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki manajemen laba lebih besar dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik. Hal ini disebabkan perusahaan dengan koneksi politik memperoleh tekanan yang lebih rendah dari pasar untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Penelitian Harymawan dan Nowland (2016) juga membuktikan bahwa perusahaan yang dengan koneksi politik memiliki kualitas laba yang lebih rendah yang ditunjukkan dengan *discretionary accrual* yang lebih tinggi.

Hasil beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh manajemen laba terhadap kompensasi eksekutif menunjukkan hasil yang positif. Li, Holmes, dan

Lee (2016) mengungkapkan bukti bahwa terdapat pengaruh positif antara manajemen laba terhadap kompensasi eksekutif. Manajemen puncak dapat meningkatkan kompensasinya melalui pilihan akuntansi diskresioner ketika tingkat manajemen laba berada pada level moderat. Shuto (2007) menunjukkan bahwa penggunaan pilihan akuntansi akrual diskresioner untuk meningkatkan laba dapat meningkatkan kompensasi dewan direksi dan komisaris. Adut, Holder, dan Robin (2013) mengungkapkan bahwa manajemen laba berhubungan positif dengan kompensasi eksekutif.

Hair Jr, Hult, Ringle, dan Sarstedt (2017, p. 232) menyebutkan bahwa analisis mediasi dapat diperoleh melalui sintesis hasil penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan fenomena dan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas, peneliti mencoba menambah literatur dengan menguji secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif melalui manajemen laba sebagai variabel mediator sebagai kebaruan dalam penelitian ini.

Hasil penjabaran penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan manajemen laba yang berujung pada peningkatan kompensasi eksekutif. Variabel mediator merupakan mekanisme atau proses yang mendasari hubungan antara dua konstruk (Hair Jr dkk., 2017, p. 228). Peneliti menggunakan *Process Theory of Motivation* dan *Positive Accounting Theory* untuk memahami bagaimana koneksi politik berpengaruh pada peningkatan kompensasi eksekutif melalui manajemen laba.

Topik utama dalam *Process Theory of* adalah motivator ekstrinsik dan motivator intrinsik. Koneksi politik yang dimiliki dewan direksi dan komisaris

merupakan motivator instrinsik. Koneksi politik adalah indikator status sosial mereka serta prestise sumber daya sosial dan politik yang dapat mereka bawa ke perusahaan (Belliveau, O'Reilly III, dan Wade, 1996). Perusahaan dengan koneksi politik lebih percaya diri dalam memperoleh manfaat melalui koneksi politik mereka, mengurangi kebutuhan mereka untuk menanggapi tekanan pasar dan menghasilkan manajemen laba yang lebih tinggi (Harymawan dan Nowland, 2016).

Pusat setiap kebijakan akuntansi adalah manajemen, oleh sebab itu dalam teori akuntansi positif terlebih dahulu memahami motivasi manajemen Watts dan Zimmerman (1978). *Positive Accounting Theory* (PAT) menyebutkan bahwa manajer perusahaan menentukan kebijakan akuntansi untuk kepentingan mereka sendiri salah satunya adalah pada hipotesis rencana bonus (W. R. Scott, 2012). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kompensasi eksekutif merupakan motivator ekstrinsik. Kompensasi eksekutif menjadi *goals* atau tujuan yang ingin dicapai manajemen. Langton dkk. (2016) menyebutkan bahwa penetapan goals yang terlalu efektif dapat membuat individu berfokus pada hasil dan melakukan segala cara untuk mencapainya, termasuk "*cooking the book*" atau manajemen laba.

Penelitian ini akan menggunakan sampel seluruh perusahaan di semua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 kecuali perusahaan sektor industri keuangan dan asuransi. Perusahaan sektor industri keuangan dan asuransi dikeluarkan dalam sampel karena sifat laporan keuangan

yang berbeda dengan sektor lain. Pengolahan data dilakukan menggunakan *software* WarpPLS 6.0.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah koneksi politik berpengaruh terhadap kompensasi eksekutif melalui manajemen laba ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif melalui manajemen laba.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah terutama pada kajian tentang koneksi politik, manajemen laba dan kompensasi eksekutif. Studi terkait koneksi politik dan manajemen laba sudah sangat beragam, namun baru sedikit riset yang meneliti pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif serta peran mediasi manajemen laba dalam pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi pelaku bisnis maupun praktisi terkait hal yang dapat melatarbelakangi keputusan atau tindakan direksi dan komisaris dengan koneksi politik terutama dalam kaitannya dengan manajemen laba perusahaan dan kebijakan kompensasi eksekutif.

### 1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan menguji pengaruh koneksi politik sebagai variabel independen terhadap kompensasi eksekutif sebagai variabel dependen melalui manajemen laba sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web BEI yang diambil dari seluruh laporan keuangan dan tahunan perusahaan pada periode tahun 2016-2018 dengan mengecualikan perusahaan yang termasuk dalam industri keuangan. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *purposive sampling*.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penjelasan penulisan tesis ini akan dijelaskan dalam lima bagian, meliputi:

#### **BAB 1 : Pendahuluan**

Bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisi antara lain *research gap*, teori yang digunakan, fenomena serta regulasi yang terkait dengan koneksi politik, manajemen laba dan kompensasi eksekutif dalam perusahaan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, serta motivasi peneliti meneliti topik tersebut. Bab



ini juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang dibahas berkaitan dengan pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif melalui manajemen laba.

## **BAB 2 : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi studi teoritis yang membahas teori yang mendukung penelitian, yaitu *Process Theory of Motivation* dan *Positive Accounting Theory*. Bab ini juga membahas tentang definisi koneksi politik, manajemen laba dan kompensasi eksekutif, penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis. Penulis mengembangkan hipotesis berdasarkan teori pendukung dan penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian dirangkum ke dalam kerangka konseptual.

## **BAB 3: Metode Penelitian**

Bab ini menjabarkan jenis penelitian kuantitatif, definisi operasional dan pengukuran variabel-variabel yang digunakan seperti koneksi politik sebagai variabel independen, manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals* sebagai proksi untuk manajemen laba, kompensasi eksekutif sebagai variabel dependen dan variabel-variabel kontrol lainnya. Penulis menggunakan data sekunder perusahaan berupa laporan tahunan dan laporan keuangan seluruh perusahaan yang telah diaudit dan terdaftar dalam BEI tahun 2016-2018 kecuali perusahaan sektor industri keuangan dan asuransi. Teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability* dengan pendekatan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan SEM-PLS untuk melihat hubungan setiap variabel

serta melakukan analisis tambahan. Alat pengolahan data yang digunakan adalah *software* WarpPLS 6.0.

#### **Bab 4 : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi. Bab ini juga menyajikan interpretasi atas hasil penelitian dari metode statistik seperti statistik deskriptif dan *Goodness of Fit Model* yang dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan metode SEM-PLS, pembahasan serta analisis tambahan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

#### **Bab 5 : Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi simpulan mengenai hasil dan pembahasan yang menjadi jawaban atas permasalahan dan hipotesis yang telah diungkapkan mengenai pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi eksekutif dengan manajemen laba sebagai variabel mediasi. Bab ini juga menyajikan saran yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema yang sama.